

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena *NEET* (*Not in Employment, Education, or Training*) di Provinsi Aceh merupakan isu yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor signifikan. Status *NEET* pada usia muda 15–24 tahun dipengaruhi oleh jenis kelamin, status perkawinan, usia, tingkat pendidikan, pendidikan orang tua KRT (Kepala Rumah Tangga), klasifikasi wilayah tempat tinggal, dan disabilitas. Usia muda dengan jenis kelamin perempuan yang telah menikah memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk menjadi *NEET*, terutama karena norma sosial yang menempatkan tanggung jawab domestik sebagai prioritas utama. Selain itu, kelompok usia muda 15–19 tahun memiliki risiko lebih besar untuk masuk dalam kategori *NEET* dibandingkan dengan kelompok usia 20–24 tahun, mengindikasikan perlunya perhatian khusus pada transisi dari pendidikan ke dunia kerja atau pelatihan.

Rendahnya tingkat pendidikan pemuda serta pendidikan orang tua KRT juga menjadi determinan utama yang meningkatkan risiko seseorang menjadi *NEET*. Pemuda di wilayah perdesaan ditemukan lebih berisiko menjadi *NEET* dibandingkan mereka yang tinggal di wilayah perkotaan, akibat kurangnya akses terhadap fasilitas pendidikan, pelatihan, dan lapangan kerja. Kondisi disabilitas juga menjadi faktor penting, di mana pemuda dengan disabilitas cenderung memiliki peluang lebih besar untuk menjadi *NEET* dibandingkan mereka yang tidak memiliki keterbatasan fisik atau mental. Dalam hal klasifikasi, mayoritas pemuda *NEET* di Aceh termasuk dalam kategori *inactive NEET*, yaitu mereka yang tidak bekerja, tidak mencari kerja, dan tidak terlibat dalam pendidikan atau pelatihan.

Hasil analisis regresi logistik biner menunjukkan bahwa model yang digunakan dalam penelitian ini mampu menjelaskan hubungan antara variabel independen dan status *NEET* dengan tingkat keakuratan yang memadai. Penelitian ini menyoroti pentingnya upaya pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk merancang kebijakan yang lebih inklusif dan terfokus, seperti meningkatkan kualitas dan akses pendidikan, menyediakan pelatihan vokasi yang relevan, menciptakan lapangan

kerja di wilayah pedesaan, serta memberikan dukungan bagi usia muda dengan disabilitas. Hal ini penting dilakukan untuk mengurangi angka *NEET*, mendukung pemberdayaan usia muda, dan memanfaatkan potensi bonus demografi di Provinsi Aceh. Penelitian ini juga merekomendasikan penguatan peran keluarga dan komunitas dalam mendorong usia muda untuk melanjutkan pendidikan dan terlibat dalam pelatihan keterampilan, sebagai upaya untuk mengurangi dampak sosial-ekonomi dari status *NEET*.

5.2 Saran

Berdasarkan uraian serta pembahasan mengenai pengaruh jenis kelamin, status perkawinan, umur, pendidikan, pendidikan orang tua KRT, klasifikasi daerah tempat tinggal dan disabilitas terhadap usia muda berstatus *NEET* di Aceh maka saran yang dapat diberikan adalah:

1. Kebijakan pendukung untuk mengurangi beban perempuan muda:
 - Penyediaan fasilitas penitipan anak yang terjangkau dan fleksibel dapat membantu perempuan muda, terutama yang telah menikah, untuk kembali berpartisipasi dalam pendidikan, pelatihan, atau pekerjaan.
 - Pemerintah juga dapat menyediakan program kerja paruh waktu atau fleksibel yang memungkinkan perempuan muda untuk tetap aktif secara ekonomi tanpa meninggalkan tanggung jawab keluarga.
2. Pemerintah sebaiknya memperluas program pelatihan keterampilan bagi pemuda yang belum bekerja atau tidak terlibat dalam sistem pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status perkawinan pada pemuda meningkatkan kemungkinan mereka menjadi bagian dari kelompok *NEET*. Menanggapi hal ini, pemerintah disarankan untuk memperkuat program pelatihan kerja khususnya bagi pemuda *NEET* yang telah menikah namun belum memasuki pasar kerja. Program pelatihan ini dapat diimplementasikan melalui:
 - Memaksimalkan fungsi Balai Latihan Kerja (BLK) dengan meningkatkan

fasilitas, kualitas, dan kuantitas pelatihan yang disediakan. Hal ini bertujuan agar peserta mampu mengaplikasikan keterampilan yang diperoleh untuk memulai usaha mandiri.

- Mempererat kolaborasi dengan perusahaan swasta dan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) untuk menyelenggarakan pelatihan kerja dan program magang bagi pemuda yang tidak bekerja atau tidak sedang menempuh pendidikan.
3. Pemerintah diharapkan meningkatkan aksesibilitas dan transparansi informasi terkait pelatihan kerja dan peluang kerja, khususnya bagi generasi muda. Upaya yang dapat dilakukan meliputi:
- Bekerjasama dengan pihak swasta untuk mengadakan pameran kerja secara rutin, sehingga pencari kerja, khususnya generasi muda, dapat dengan mudah mengakses informasi pekerjaan dan memilih posisi yang sesuai dengan latar belakang pendidikan mereka.
 - Mendorong perusahaan untuk mempublikasikan lowongan kerja secara terbuka, baik melalui media online maupun offline.
4. Pemerintah disarankan untuk mereformasi sistem pendidikan agar lebih selaras dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Perubahan ini penting mengingat hasil penelitian menunjukkan bahwa pemuda *NEET* sebagian besar berasal dari kelompok dengan tingkat pendidikan yang relatif tinggi. Hal ini menandakan bahwa pendidikan tinggi saja belum cukup untuk memastikan kemudahan akses ke pekerjaan. Dalam konteks ini, lembaga pendidikan, khususnya pendidikan tinggi, perlu meningkatkan perannya dalam mempersiapkan lulusan yang siap menghadapi dunia kerja. Beberapa langkah yang dapat dilakukan meliputi:
- Meningkatkan mutu pendidikan melalui pembaruan sistem dan kurikulum agar menghasilkan lulusan yang kompeten dan berkualitas sehingga mampu bersaing di pasar kerja.
 - Mengembangkan program magang, layanan bimbingan karir, dan pendidikan kewirausahaan di sekolah kejuruan dan perguruan tinggi untuk meningkatkan keterampilan praktis lulusan.

- Mendorong kolaborasi aktif dengan sektor swasta dan pemangku kepentingan terkait dalam perencanaan dan pelaksanaan pendidikan kejuruan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kesesuaian antara kebutuhan dunia pendidikan dan dunia kerja (*Link and Match*).
5. Pemerintah perlu memperhatikan peran pendidikan orang tua KRT dalam memengaruhi status *NEET* pada pemuda. Orang tua dengan tingkat pendidikan rendah cenderung kurang mendukung anak mereka untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau terlibat dalam pelatihan keterampilan. Oleh karena itu, program penyuluhan dan edukasi bagi orang tua perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan dan pelatihan bagi masa depan anak-anak mereka. Selain itu, pemerintah dapat memberikan akses yang lebih luas terhadap program pendidikan nonformal atau pelatihan keterampilan bagi keluarga dengan latar belakang pendidikan rendah, sehingga orang tua juga dapat berperan lebih aktif dalam mendorong anak-anak mereka keluar dari status *NEET*. Intervensi ini penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pemberdayaan pemuda melalui pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja.
 6. Pemerintah hendaknya terus meningkatkan pemerataan Pembangunan antara wilayah perdesaan dengan perkotaan. Pemerataan dipandang perlu karena dengan meningkatnya perekonomian dan sarana publik di wilayah perdesaan maka kesempatan kerja, pendidikan dan taraf kehidupan masyarakat akan ikut meningkat. Akses masyarakat terhadap pendidikan akan lebih mudah, disamping itu masyarakat termasuk pencari kerja usia muda memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan. Dengan demikian peluang seorang pemuda yang tinggal di wilayah perdesaan untuk menjadi *NEET* akan semakin kecil. Sehingga proporsi pemuda *NEET* di wilayah perdesaan akan dapat dikurangi.
 7. Kebijakan untuk pemuda dengan disabilitas:
 - Pemerintah harus merancang program pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pemuda dengan disabilitas.

- Penyediaan lapangan kerja inklusif, yang mempertimbangkan kemampuan fisik dan mental pemuda dengan disabilitas, dapat dilakukan dengan melibatkan sektor swasta melalui insentif pajak atau subsidi.

